



ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN PADANG PARIAMAN 2017



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN PADANG PARIAMAN 2017



KATA PENGANTAR

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan data statistik, khususnya data mengenai kualitas sumber daya manusia Kabupaten Padang Pariaman, Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah menyelesaikan buku publikasi **"Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Padang Pariaman 2017"**.

Publikasi ini menyajikan data IPM yang dihitung berdasarkan metode baru yang merupakan penyempurnaan dari metode yang digunakan pada 3 (tiga) tahun sebelumnya. IPM metode baru ini menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik, di samping itu capaian yang rendah pada satu komponen tidak dapat ditutupi oleh capaian komponen lain yang nilainya lebih tinggi.

Diharapkan dengan terbitnya buku ini, para peneliti, akademisi, dan pemakai data pada umumnya serta pemerintah dapat memanfaatkannya, baik sebagai bahan evaluasi maupun bahan perencanaan pembangunan yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam mengusahakan terwujudnya publikasi ini, baik langsung maupun tidak langsung, diucapkan terima kasih.

Kami menyadari bahwa publikasi ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas data dan penyajiannya di masa mendatang.

Parit Malintang, November 2018
BUPATI PADANG PARIAMAN

H. ALI MUKHNI

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar	viii
Daftar Grafik	ix
B A B I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Konsep Pembangunan Manusia dan Pengukuran.....	3
1.3. Pembangunan Manusia Indonesia Seutuhnya.....	8
1.4. Indeks Pembangunan Manusia : Pengukuran Pencapaian Pembangunan	9
1.5. Pemanfaatan Indeks Pembangunan Manusia dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.....	12
1.5.1. Kedudukan IPM dalam Pembangunan Daerah	12
1.5.2. Sistem Informasi Pembangunan Manusia	14
B A B II. METODOLOGI PENELITIAN	17
2.1. Sumber Data	17
2.2. Konsep Definisi	17
2.3. Konsep IPM dan Tehnik Penghitungan	19
B A B III. KONDISI DAN POTENSI SOSIAL EKONOMI	23
3.1. Kependudukan	24
3.2. Pendidikan	28
3.3. Ketenagakerjaan	31
3.4. Perekonomian	35

B A B IV.	KONDISI KOMPONEN-KOMPONEN IPM	39
	4.1. Indeks Pendidikan	39
	4.2. Indeks Kesehatan	44
	4.3. Indeks Pengeluaran	45
B A B V.	STATUS DAN PERKEMBANGAN IPM.....	47
	5.1. Status Pembangunan Manusia	47
B A B VI.	ANALISIS IPM TERHADAP KEMISKINAN, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	51
	6.1. Pendahuluan	51
	6.2. Kesehatan.....	51
	6.3. Harapan Lama Sekolah	52
	6.4. Daya Beli.....	54
B A B VII.	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	59
	7.1. Kesimpulan	59
	7.2. Rekomendasi	60

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1.	Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Komponen IPM 21
Tabel 3.1.	Jumlah Nagari/Desa dan Luas Wilayah Tahun 2017 22
Tabel 3.2.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2017 24
Tabel 3.3.	Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2017 26
Tabel 3.4	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Keatas Menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2017 28
Tabel 3.5	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Teringgi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2017 29
Tabel 3.6	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin Tahun 2017 31
Tabel 3.7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 32
Tabel 3.8	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2017 33
Tabel 3.9	Presentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2017 35

Tabel 3.10	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Padang Pariaman Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2016-2017 (Juta Rupiah)	39
Tabel 4.1	Presentase Penduduk 15 Tahun Keatas menurut Karakteristik dan Kemampuan Membaca dan Menulis di Padang Pariaman Tahun 2017	45
Tabel 5.1	Status dan Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Padang Pariaman dan Sumatera Barat Tahun 2015 - 2017	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Hubungan Antara Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi	7
----------	--	---

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Perbandingan Presentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Buta Huruf Menurut Jenis Kelamin di Padang Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat, 2017	41
Grafik 4.2	Presentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Terakhir yang ditamatkan di Kabupaten Padang pariaman 2017	42
Grafik 4.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal Penduduk Berumur 15-18 Tahun menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2017	43
Grafik 4.4	Perbandingan Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan antara Padang Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat, 2015-2017	46
Grafik 5.1	Perbandingan IPM Kabupaten Padang Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat, 2015-2017	48
Grafik 5.2	Perbandingan IPM Kabupaten Padang Pariaman, Agam dan Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat, 2010-2017	50
Grafik 6.1	Perkembangan Angka Harapan Hidup Padang Pariaman, 2010-2017	53
Grafik 6.2	Harapan Lama Sekolah Padang Pariaman, 2010-2017	54
Grafik 6.3	Rata-rata Lama Sekolah Padang Pariaman, 2010-2017	54
Grafik 6.4	Daya Beli Padang Pariaman, 2010-2017	55
Grafik 6.5	Kontribusi Tiga Aspek Terhadap Kemiskinan	56
Grafik 6.6	Kontribusi Gizi dan Prasekolah	

Bab 1.

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang.

Manusia sebagai subjek dan objek pembangunan dalam kehidupannya harus mampu meningkatkan kualitas hidupnya sebagai insan pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Konsep pembangunan manusia memenuhi dimensi yang sangat luas dengan banyak pilihan, hanya mungkin tercapai jika penduduk tersebut memiliki :

1. Peluang angka harapan hidup yang tinggi atau umur panjang dan sehat,
2. Pengetahuan dan keterampilan atau keahlian, serta
3. Peluang atau kesempatan untuk merealisasikan pengetahuan tersebut dalam kegiatan yang produktif, sehingga penduduk memiliki daya beli.

Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan atau kinerja (*performance*) suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)*.

Untuk mewujudkan tercapainya ketiga unsur tersebut dilakukan upaya konkret dan berkesinambungan, misalnya untuk mencapai umur panjang ataupun Angka Harapan Hidup yang tinggi, harus didukung oleh tingkat kesehatan yang baik, status gizi baik dan semua prasarana lingkungan yang baik. Untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan, manusia harus meningkatkan kualitas pendidikannya, pembangunan pendidikan harus diutamakan untuk meningkatkan angka melek huruf. Untuk itu rata-rata lama bersekolah harus diatas 12 tahun

atau tamat SLTA. Disamping itu penduduk harus mempunyai kesempatan untuk merealisasikan pengetahuan dan keterampilannya dengan tersedianya lapangan pekerjaan, sehingga dapat direfleksikannya dalam kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan bagi manusia. Dengan pendapatan tersebut manusia dapat memenuhi kebutuhannya dengan terciptanya daya beli. Akhirnya dengan ketiga unsur di atas masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan mencapai standar hidup layak.

Selain itu, secara umum pembangunan manusia dalam pengertian luas mengandung konsep teori pembangunan ekonomi konvensional termasuk model pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia (SDM), pendekatan kesejahteraan dan pendekatan kebutuhan dasar manusia. Model pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan produksi nasional (GNP). Pembangunan SDM menempatkan manusia, terutama sebagai input dari proses produksi (sebagai suatu sarana bukan tujuan). Pendekatan kesejahteraan melihat manusia sebagai pemanfaat (*beneficiaries*), bukan sebagai agen perubahan dalam pembangunan. Pendekatan kebutuhan dasar memfokuskan pada penyediaan barang dan jasa kebutuhan hidup.

Hubungan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi sangat erat dan merupakan prasyarat untuk mencapai pembangunan manusia, karena peningkatan pembangunan ekonomi akan mendukung peningkatan produktivitas melalui pengisian kesempatan kerja dengan usaha-usaha produktif sehingga tercipta peningkatan pendapatan (*United Nations Development Programme*, 1996).

1.2. Konsep Pembangunan Manusia dan Pengukuran.

UNDP (*United Nations Development Programme*) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan

bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimate end*), sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah 1). Produktivitas, 2).Pemerataan, 3). Kestinambungan, dan 4). Pemberdayaan (UNDP, 1995:12).

Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

Produktivitas

Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan untuk berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan atau nafkah dan penciptaan lapangan pekerjaan. Pembangunan ekonomi, dengan demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia.

Pemerataan

Penduduk harus memiliki kesempatan/peluang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

Kestinambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus diperhatikan, tidak hanya untuk sekarang tetapi juga untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya (fisik, manusia, dan lingkungan) harus selalu diperbaharui (*replenished*).

Pemberdayaan

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan, karenanya pembangunan harus dari dan oleh penduduk, bukan hanya untuk mereka.

Sebenarnya paradigma pembangunan manusia tidak berhenti sampai di sana. Pilihan-pilihan tambahan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat luas seperti kebebasan politik, ekonomi dan sosial, sampai kesempatan untuk berkreasi dan produktif, dan menikmati kehidupan yang sesuai dengan harkat pribadi dan jaminan hak-hak asasi manusia merupakan bagian dari paradigma tersebut. Dengan demikian, paradigma pembangunan manusia memiliki dua sisi. Sisi pertama berupa formasi kapabilitas manusia, seperti perbaikan taraf kesehatan, pendidikan, dan keterampilan. Sisi lainnya adalah pemanfaatan kapabilitas mereka untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial dan politik. Jika kedua sisi itu tidak seimbang, maka hasilnya adalah frustrasi masyarakat (UNDP, 1995 : II).

Konsep pembangunan manusia dalam pengertian di atas, jauh lebih dari pada teori-teori pembangunan ekonomi yang konvensional termasuk model pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia (SDM), pendekatan kesejahteraan dan pendekatan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Model pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan produksi nasional (GNP). Pembangunan SDM menempatkan manusia terutama sebagai input dari proses produksi (sebagai suatu sarana bukan tujuan). Pendekatan kesejahteraan melihat manusia sebagai pemanfaatan (*beneficiaries*) bukan sebagai agen perubahan dalam pembangunan. Pendekatan kebutuhan dasar memfokuskan pada penyediaan barang dan jasa kebutuhan hidup.

Namun demikian, pembangunan ekonomi (atau lebih tepat pertumbuhan

ekonomi) merupakan prasyarat bagi tercapainya pembangunan manusia, karena pembangunan ekonomi menjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja. Menurut UNDP (1996), hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi bersifat timbal balik seperti disajikan pada gambar 1, artinya, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pembangunan manusia. Arah panah bawah-atas menegaskan arti penting pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia. Sukar dibayangkan ada negara yang dapat menjalankan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tanpa pertumbuhan ekonomi yang memadai. Arah panah atas-bawah yang merupakan asumsi dasar pendekatan SDM, merupakan penegasan adanya alasan ekonomis (*economic reasons*) dari pembangunan manusia yang keabsahannya terus ditunjang oleh bukti-bukti empiris.

Akan tetapi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia secara empiris terbukti tidak bersifat otomatis. Artinya, banyak negara (atau wilayah) yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat tanpa diikuti oleh pembangunan manusia yang seimbang. Contohnya adalah Cina, Mongolia, Korea Utara dan Brasil (Laporan Pembangunan Manusia Tahun 2001; Kerjasama BPS, BAPPENAS dan UNDP). Sebaliknya, banyak pula negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang sedang tetapi terbukti dapat meningkatkan kinerja pembangunan manusia secara mengesankan. Contohnya Sri Lanka, Costa Rica, Trinidad dan Tobago (Laporan Pembangunan Manusia Tahun 2001; Kerjasama BPS, BAPPENAS dan UNDP). Bukti empiris ini tidak berarti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak penting bagi pembangunan manusia. Namun pertumbuhan ekonomi justru merupakan sarana utama bagi pembangunan manusia, terutama pertumbuhan ekonomi yang merata secara sektoral dan kondusif terhadap penciptaan lapangan kerja. Hubungan yang tidak otomatis ini sesungguhnya merupakan tantangan bagi pelaksana pemerintahan untuk

merancang kebijakan yang mantap, sehingga hubungan keduanya saling memperkuat.

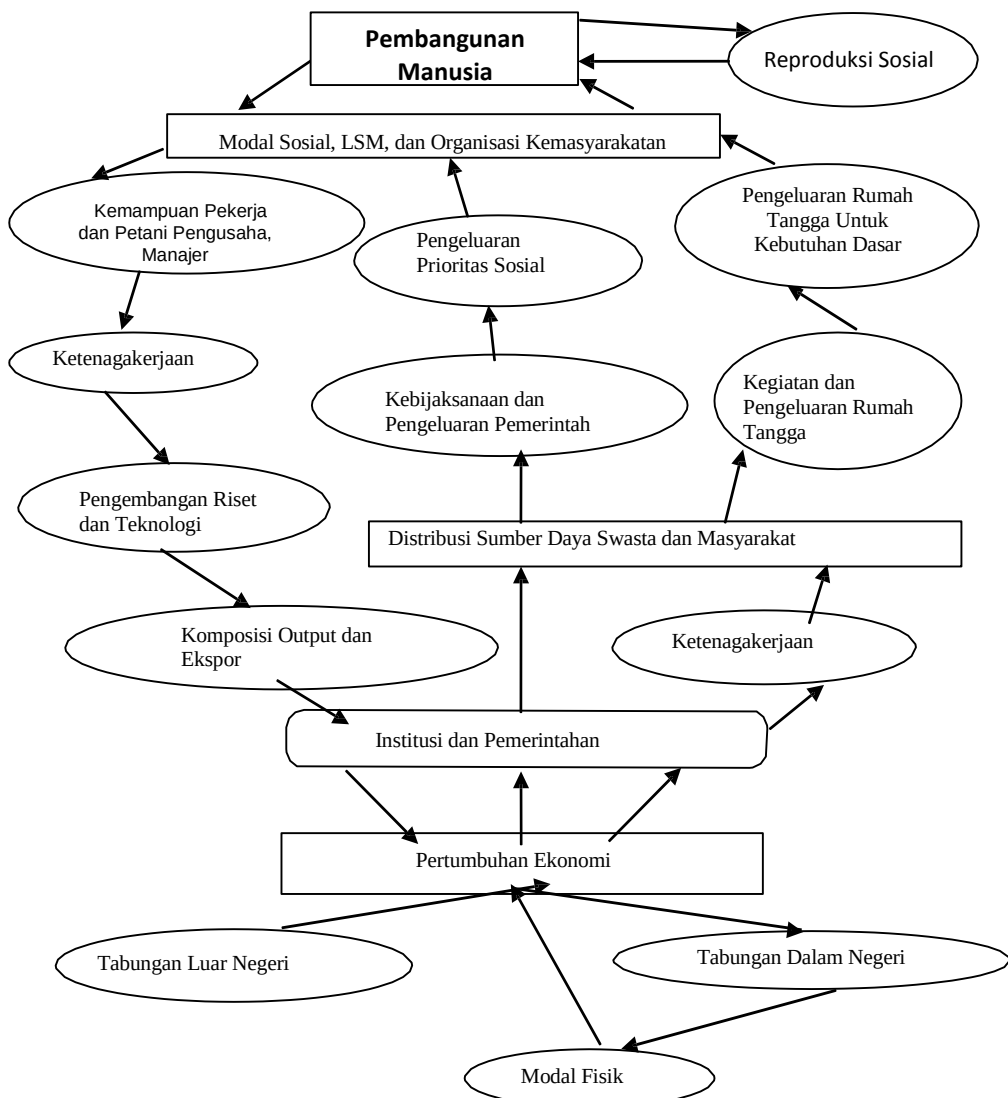
Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia berlangsung melalui dua jalur.

- Jalur **pertama** melalui kebijaksanaan dan pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini faktor yang menentukan adalah pengeluaran pemerintah untuk sub sektor sosial yang merupakan prioritas seperti pendidikan dan kesehatan dasar. Besarnya pengeluaran itu merupakan indikasi besarnya komitmen pemerintah terhadap pembangunan manusia.
- Jalur **kedua** adalah melalui kegiatan pengeluaran rumah tangga. Dalam hal ini faktor yang menentukan adalah besar dan komposisi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan dasar seperti pemenuhan nutrisi anggotanya, untuk biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar, serta untuk kegiatan lain yang serupa. Selain pengeluaran pemerintah dan pengeluaran rumah tangga hubungan antara kedua variabel itu berlangsung melalui penciptaan lapangan kerja. Aspek ini sangat penting karena sesungguhnya, penciptaan lapangan kerja merupakan “ jembatan utama “ yang menghubungkan keduanya (UNDP, 1996 : 87).

Hubungan atas bawah antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia pada gambar 1 dibawah ini cukup jelas. Melalui upaya pembangunan manusia, kemampuan dasar, dan keterampilan tenaga kerja termasuk petani, pengusaha, dan manager akan meningkat. Selain itu, pembangunan manusia akan mempengaruhi jenis produksi domestik, kegiatan riset dan pengembangan teknologi yang pada akhirnya akan mempengaruhi komposisi output dan ekspor suatu negara. Kuatnyahubungan timbal balik antara pertumbuhan dan pembangunan manusia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kelembagaan pemerintah, distribusi sumber daya swasta dan masyarakat, modal sosial, LSM,

dan organisasi kemasyarakatan.

Gambar 1. Hubungan Antara Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi



Sumber : United Nations Development Programme (1996)

Lembaga pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting, karena keberadaannya sangat menentukan implementasi suatu kebijakan publik. Faktor distribusi sumber daya juga jelas karena tanpa distribusi sumber daya yang merata (misalnya dalam penguasaan lahan atau sumber daya ekonomi lainnya), hanya akan menimbulkan masalah dalam masyarakat. Faktor modal sosial menegaskan arti penting peranan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Inti dari modal sosial adalah kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan perilaku pemerintah. Semua faktor-faktor tersebut berperan sebagai suatu katalisator bagi berlangsungnya hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia secara efisien.

1.3. Pembangunan Manusia Indonesia Seutuhnya

Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk baik fisik, mental maupun secara spritual. Bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa pembangunan yang dilakukan dititik beratkan pada pembangunan sumber daya manusia yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi (Dirjen Pembangunan Daerah, 1998). Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas fisik dan mental penduduk dilakukan pemerintah melalui pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan yang program pembangunannya dirancang untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar. Pada sektor ekonomi, asas pemerataan yang diimplementasikan antara lain adalah dengan memberikan

bantuan usaha seperti gerobak untuk UMKM dan pinjaman usaha. Selain itu bantuan untuk rumah tangga berupa bantuan sosial beras(rastra), Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) sesuai amanat UU No. 40 Tahun 2004, bantuan rehab rumah keluarga miskin, bantuan keluarga penerima manfaat (KPM) dan jaminan pendidikan dasar anak dengan program wajib belajar 12 tahun.

Penciptaan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha ditempuh secara makro ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Dengan tumbuhnya kesempatan kerja dan berusaha, memungkinkan peningkatan pendapatan penduduk, yang diharapkan dapat mengurangi jumlah penduduk hidup miskin. Hal ini merupakan 'jembatan utama' dalam meningkatkan daya beli melalui pertumbuhan ekonomi yang merupakan prinsip pemberdayaan.

Pembangunan bidang sosial yang sangat mengesankan adalah upaya pengendalian jumlah penduduk melalui program keluarga berencana. Upaya ini secara nyata telah berhasil menurunkan angka kelahiran hingga setengahnya (dari 5,6 pada tahun 1971 menjadi 2,8 tahun 2000) yang kemudian berpengaruh pada pengurangan laju pertumbuhan penduduk. Dari sudut pandang pembangunan, keberhasilan mengurangi laju pertumbuhan penduduk dalam konteks Indonesia, sesungguhnya merupakan upaya untuk mempercepat peningkatan kualitas hidup, oleh karena bagian terbesar penduduk Indonesia ditinjau dari berbagai indikator sosial (seperti angka kematian bayi, pendidikan yang ditamatkan penduduk, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, tingkat daya beli penduduk, dll) berada pada tingkatan kualitas yang masih rendah.

1.4. Indeks Pembangunan Manusia: Pengukuran Pencapaian Pembangunan

Pembangunan manusia menyangkut dimensi yang sangat luas. Upaya membuat pengukuran pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah harus dapat memberikan gambaran tentang dampak dari

pembangunan manusia bagi penduduk, sekaligus dapat memberikan gambaran tentang persentase pencapaian terhadap sasaran ideal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah :

- 1) Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang mengukur umur harapan hidup,
- 2) Dimensi pengetahuan yang mengukur harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.
- 3) Dimensi standar hidup layak yang mengukur pengeluaran perkapita yang disesuaikan dengan 96 komoditas yang ditentukan untuk diukur

Indeks Pembangunan Manusia, dimaksudkan untuk mengukur dampak dari upaya peningkatan kemampuan dasar tersebut. Dengan demikian, Indeks Pembangunan Manusia menggunakan indikator dampak sebagai komponen dasar penghitungannya yaitu:

- a. Angka/Umur harapan hidup waktu lahir (AHH/UHH),
- b. Pencapaian pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah,
- c. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu mampu mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), serta tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran itu.

Karena hanya mencakup empat komponen (angka harapan hidup waktu

lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita) maka Indeks Pembangunan Manusia harus dilihat sebagai penyederhanaan dari realitas yang kompleks yang tercermin dari luasnya dimensi pembangunan manusia. Oleh karena itu, pesan dasar IPM dalam menganalisis kesejahteraan belumah mencakup semua aspek kehidupan. Sehingga, perlu dilengkapi dengan kajian dan analisis yang dapat mengungkapkan dimensi-dimensi pembangunan manusia yang penting lainnya (yang tidak seluruhnya dapat diukur) seperti kebebasan politik, kesinambungan lingkungan, pemerataan antar generasi, perkembangan mental generasi, dan masih banyak sisi lainnya.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan alat ukur yang dapat memberikan gambaran perubahan yang terjadi, terutama pada komponen daya beli. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 berdampak pada menurunnya tingkat pendapatan yang diakibatkan banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan menurunnya kesempatan kerja (kesempatan kerja pada bulan Agustus 1997 mencapai 95,3%, menjadi 94,5% pada tahun 1998 dan 93,6% pada tahun 1999, pada tahun 2002 mencapai 90,94%) yang kemudian dipengaruhi tingkat inflasi yang tinggi selama tahun 1997–1998 (inflasi mengalami peningkatan dari 6% pada tahun 1997 menjadi 78% pada tahun 1998, pada tahun 2001 sebesar 12,55% dan 2002 sebesar 10,03%). Menurunnya tingkat kesempatan kerja dalam konteks pembangunan manusia, merupakan terputusnya jembatan yang menghubungkan antara pertumbuhan ekonomi dengan upaya peningkatan kapasitas dasar penduduk.

Dampak krisis ekonomi pada pembangunan manusia adalah dengan menurunnya daya beli yang juga berarti terjadinya penundaan upaya peningkatan kapasitas fisik dan kapasitas intelektual penduduk.

1.5. Pemanfaatan Indeks Pembangunan Manusia dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Sebagai ukuran komposit tunggal, IPM (antara 0 – 100) menunjukkan tingkatan status pembangunan manusia di suatu wilayah yang kemudian berfungsi sebagai patokan dasar perencanaan jika dibandingkan :

- i. Antar waktu untuk memberikan gambaran kemajuan/kemunduran setelah suatu periode, atau
- ii. Antar wilayah untuk memberikan gambaran tentang tingkat kemajuan/kemunduran suatu wilayah yang relatif dekat terhadap wilayah lain.

Untuk lebih memberikan petunjuk tentang status pembangunan manusia di suatu wilayah, sebagai alat ukur komposit, IPM harus dikaitkan dengan setiap indikator komponennya dan berbagai indikator lain yang berkaitan.

Di sektor perencanaan, pemanfaatan IPM terbatas hanya sebagai patokan dasar. Oleh karena itu, dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran hendaknya dilakuka dengan kajian dan penelitian lebih lanjut.

Dengan lingkup yang lebih kecil sehingga diperoleh petunjuk yang lebih jelas tentang arah kebijakan pembangunan yang terbaik dimasa yang akan datang.

1.5.1. Kedudukan IPM dalam Pembangunan Daerah

Pembangunan merupakan aktualisasi dari aspirasi masyarakat suatu bangsa, yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan secara struktural melalui upaya sistematis dan terencana (Indeks Pembangunan Manusia Daerah Tingkat II Tahun 1990-1996; Kerjasama BPS, UNDP, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah). Dalam konteks ini, perencanaan pembangunan merupakan tahapan yang menentukan bagi keberhasilan untuk mencapai tujuan yang sudah digariskan dalam GBHN dan Pola Dasar Pembangunan Daerah. Proses perencanaan meliputi

pemantauan dan evaluasi terhadap pelbagai program yang telah diimplementasikan pada periode sebelumnya. Kajian situasi dan kondisi yang obyektif tentang permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan pelbagai program pembangunan, perlu dilakukan untuk menentukan pentahapan, pencapaian tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek serta untuk menentukan prioritas. Melalui kajian tersebut dirumuskan suatu kebijakan umum yang akan menjadi pedoman bagi para perencana dalam merancang berbagai program. Dalam konteks pembangunan daerah, IPM ditetapkan sebagai salah satu ukuran utama yang dicantumkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah yang akan datang. Hal ini merupakan langkah penting karena Indeks Pembangunan Manusia menduduki salah satu posisi penting dalam manajemen pembangunan daerah, oleh karena pelaksanaan pembangunan secara luas juga meliputi unsur perencanaan, pemantauan dan evaluasi. Fungsi IPM dan indikator pembangunan manusia lainnya akan menjadi kunci bagi terlaksananya perencanaan pembangunan yang terarah.

Kedudukan dan peranan Indeks Pembangunan Manusia dalam manajemen pembangunan akan lebih terlihat kalau dilengkapi dengan *database* yang berisikan indikator yang relevan dengan IPM dan disusun sebagai suatu sistem *database* pembangunan manusia. Sistem *database* tersebut merupakan sumber data utama dalam identifikasi lebih lanjut yang dilakukan untuk mengenali lebih dalam permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan upaya dan hasil-hasil serta dampak pembangunan manusia. Identifikasi tersebut dibuat ke dalam suatu analisis situasi pembangunan manusia yang mengkaji berbagai kendala dalam implementasi program pembangunan pada periode sebelumnya dan potensi yang dimiliki suatu wilayah untuk dimasukkan sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan daerah pada periode yang akan datang. Proses ini merupakan kajian yang dapat menghasilkan rekomendasi bagi implikasi kebijakan pembangunan yang paling

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, maka IPM merupakan alat advokasi yang dapat digunakan para pengambil keputusan dan perumus kebijakan untuk menentukan langkah-langkah kebijakan yang akan diambil pada masa mendatang.

Penempatan IPM sebagai salah satu ukuran dan patokan dasar dalam penentuan sasaran dan tujuan pembangunan daerah ditetapkan setelah berbagai kajian metodologis dan empirik dilakukan serta ujicoba pemanfaatan IPM dalam perencanaan pembangunan daerah perlu dilakukan.

1.5.2. Sistem Informasi Pembangunan Manusia

Analisis situasi merupakan suatu tahapan dalam proses perencanaan yang lazim dilakukan setelah visi dan sasaran jangka panjang ditetapkan. Analisis situasi yang cermat dan menyeluruh akan mempermudah tahapan perencanaan berikutnya yaitu penetapan prioritas dan sasaran jangka menengah dan jangka pendek, serta mengidentifikasi pilihan kebijakan untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Dalam kerangka pembangunan manusia, analisis situasi harus dilakukan secara menyeluruh dalam arti mencakup semua aspek yang dianggap berkaitan dengan konsep global pembangunan manusia. Aspek-aspek yang dikaji dalam analisis tersebut disebut sebagai *issue* pembangunan manusia.

Indeks Pembangunan Manusia sebagai alat ukur status pembangunan manusia sangat sensitif terhadap perubahan yang terjadi, sehingga IPM merupakan sistem informasi pembangunan manusia yang memusatkan perhatian pada kemajuan dan pencapaian program sektoral serta kajiannya dengan program nasional. Pada tingkat kabupaten/kota, kajian ini disebut Analisis Situasi Pembangunan Manusia karena hanya mengkaji kemajuan suatu wilayah, sedangkan pada tingkat propinsi kajian ini disebut Laporan Pembangunan Manusia karena

juga mengkaji perbandingan kemajuan dan pencapaian pembangunan antar kabupaten/kota dan indikator yang terhimpun dalam Sistem Informasi Pembangunan Manusia yang diperkaya dengan permasalahan spesifik daerah yang dikemukakan.

Bab 2.

METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia adalah data yang dihasilkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2017 untuk mengukur harapan lama sekolah dan pengeluaran perkapita yang disesuaikan, Sensus Penduduk 2010, Proyeksi Penduduk, dan Survei Penduduk Antar Sensus untuk mengukur umur harapan hidup saat lahir.

2.2. Konsep Definisi

Blok sensus adalah bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan yang pada umumnya merupakan wilayah kerja seorang pencacah. Blok sensus mempunyai batas yang jelas baik batas alam maupun buatan dan diperkirakan tidak akan berubah dalam jangka waktu sekitar 10 tahun.

Segmen adalah bagian dari blok sensus yang mempunyai batas jelas. Dengan perkataan lain blok sensus dibagi habis menjadi beberapa segmen.

Rumahtangga dan Anggota Rumahtangga dalam hal ini dibedakan menjadi dua, yaitu rumahtangga biasa dan rumahtangga khusus :

Rumahtangga biasa adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah jika penggunaan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama menjadi satu. Selain rumahtangga biasa yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak, yang juga dianggap

sebagai rumahtangga biasa antara lain :

- Seseorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus dan mengurus makanannya secara sendiri.
- Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus tetapi makannya dari satu dapur asal kedua bangunan tersebut masih dalam satu segmen.
- Suatu rumahtangga yang menerima pondokan dengan makan (indekos) yang pemonoknya kurang dari 10 orang.
- Pengurus asrama, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan dan sejenisnya yang tinggal sendiri maupun bersama anak, istri serta anggota rumahtangga lainnya, makan dari satu dapur yang terpisah dari lembaga yang diurusnya.
- Masing-masing orang yang bersama-sama menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi mengurus makannya sendiri.

Rumahtangga khusus, yaitu orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) yang berjumlah 10 orang atau lebih, **tidak dicakup dalam survei ini**.

Pendidikan

Sekolah adalah sekolah formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, termasuk juga pendidikan yang disamakan.

Tidak/belum pernah sekolah adalah mereka yang tidak atau belum pernah sekolah. Termasuk mereka yang tamat/belum tamat taman Kanak-kanak yang tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD).

Masih sekolah adalah mereka yang sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.

Tidak sekolah lagi adalah mereka yang pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah atau tinggi, tetapi pada saat pencacahan tidak sekolah lagi.

Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki (ditamatkan) adalah jenjang pendidikan yang pernah diduduki (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diduduki oleh seseorang yang masih sekolah.

Konsumsi/Pengeluaran

Pengeluaran rata-rata perkapita perbulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga selama sebulan untuk konsumsi baik konsumsi makanan maupun bukan makanan semua anggota rumah tangga dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

2.3. Konsep IPM dan Teknik Penghitungan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga dimensi bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*). Secara umum metode penghitungan IPM yang disajikan dalam publikasi ini sesuai dengan metode yang digunakan *The United Nations Development Programme (UNDP)* dalam menghitung HDI.

Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai penghitungan metode dan prosedur penghitungan IPM serta komponen-komponennya .

Umur Hidup

Umur hidup diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir (*life expectancy at birth*) yang biasa dinotasikan dengan e_0 .

Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil Proyeksi SP2010.

Pengetahuan

Seperti halnya UNDP, komponen IPM, pengetahuan diukur dengan dua indikator yaitu rata-rata lama sekolah (*mean-years of schooling, MYS*) dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling- EYS*).

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

- Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.
- RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.
- Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

- HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.
- HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.
- Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren.
- Sumber data pesantren yaitu dari Direktorat Pendidikan Islam.

Standar Hidup Layak

Berbeda dengan UNDP yang menggunakan indikator GDP per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) sebagai indikator standar hidup layak.

- Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.
- Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100.
- Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungannya menggunakan Metode Rao.

Tahapan Penghitungan IPM

Tahapan pertama penghitungan IPM adalah menghitung indeks masing-masing komponen IPM (Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH_0/e_0), Pengetahuan, dan Standard Hidup Layak) dengan formula sebagai berikut:

Indeks Kesehatan

$$I_{Kesehatan} = \frac{AHH_0 - AHH_{0min}}{AHH_{0maks} - AHH_{0min}}$$

Indeks Pendidikan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Indeks Pengeluaran

$$I_{Pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{maks})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

Tahap selanjutnya **Index Pembangunan Manusia** dapat dihitung sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}} \times 100$$

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam tabel berikut,

Tabel 2.1 Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Komponen IPM

Komponen	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Tahun	20	20	85	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per kapita yang disesuaikan	Rupiah	100 (PPP US\$)	1.007.436* (Rp)	107.721 (PPP US\$)	26.572.352** (Rp)

Keterangan:

- * Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris), yaitu di Tolikara-Papua
- ** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025.

Bab 3.

KONDISI DAN POTENSI SOSIAL EKONOMI

Secara astronomis Kabupaten Padang Pariaman terletak di antara $0^{\circ}11'$ - $0^{\circ}49'$ Lintang Selatan dan $98^{\circ}36'$ – $100^{\circ}28'$ Bujur Timur. Secara geografis berbatasan dengan Kabupaten Agam di sebelah Utara, Kabupaten Solok dan Tanah Datar di sebelah Timur, sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Padang, sedangkan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Luas Kabupaten Padang Pariaman adalah $\pm 1.328,79 \text{ Km}^2$ meliputi 17 Kecamatan, 103 Nagari/Desa dan 600 Korong/RW.



Tabel 3.1. Jumlah Nagari/Desa dan Luas Wilayah di Padang Pariaman Tahun 2017

Kecamatan		Jumlah Nagari/Desa	Luas Wilayah (Km ²)
(1)		(2)	(3)
1.	Batang Anai	8	180,39
2.	Lubuk Alung	9	111,63
3.	Sintuk Toboh Gadang	5	25,56
4.	Ulakan Tapakis	8	38,85
5.	Nan Sabaris	9	29,12
6.	2x11 Enam Lingkung	3	36,25
7.	Enam Lingkung	5	39,20
8.	2x11 Kayu Tanam	4	228,70
9.	VII Koto	12	90,93
10.	Patamuan	6	53,05
11.	Padang Sago	6	32,06
12.	V Koto Kampung Dalam	8	61,41
13.	V Koto Timur	4	64,80
14.	Sungai Limau	4	70,38
15.	Batang Gasan	3	40,31
16.	Sungai Geringging	4	99,35
17.	IV Koto Aur Malintang	5	126,80

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka 2018

3.1. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada pertengahan tahun 2010 (hasil Sensus Penduduk 2010) berjumlah 392.503 jiwa, pada tahun 2012 (angka proyeksi) berjumlah 398.223 jiwa, pada tahun 2014 (angka proyeksi) berjumlah

403.530 jiwa, pada tahun 2016 (angka proyeksi) berjumlah 408.612 jiwa dan pada tahun 2017 (angka proyeksi) berjumlah 411.003 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman ini menunjukkan adanya pertumbuhan, walaupun jumlahnya tidak terlalu besar.

Sebaran penduduk antar kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman masih timpang. Tidak merata atau timpangnya sebaran penduduk, tampak lebih jelas jika dikaitkan dengan besarnya variasi luas antar daerah. Kabupaten Padang Pariaman yang mempunyai luas wilayah 1.328,79 km², kepadatan penduduknya mencapai 309 jiwa per km². Kecamatan yang paling luas wilayahnya, yaitu Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam seluas 228,7 Km², kepadatan penduduknya hanya mencapai 117 jiwa per km². Sedangkan daerah yang luas wilayahnya paling kecil, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang dengan luas hanya 25,56 Km² namun berpenduduk paling padat dengan kepadatan penduduknya sudah mencapai 734 jiwa per km².

Sebaliknya daerah yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan IV Koto Aur Malintang dengan kepadatan penduduk hanya mencapai 161 jiwa per km². Secara keseluruhan ada 6 (enam) kecamatan yang kepadatan penduduknya di bawah rata-rata kepadatan penduduk kabupaten, yaitu 2x11 Kayu Tanam (117 jiwa per km²), V Koto Timur (229 jiwa per km²), Batang Anai (260 jiwa per km²), Padang Sago (261 jiwa per km²), Sungai Geringging (282 jiwa per km²), dan Batang Gasan (271 jiwa per km²).

**Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Menurut
Kecamatan dan Jenis Kelamin
Tahun 2017**

Kecamatan		Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Batang Anai	23 688	23 195	46 883
2	Lubuk Alung	22 751	22 463	45 214
3	Sintuk Toboh Gadang	9 320	9 431	18 751
4	Ulakan Tapakis	9 419	10 262	19 681
5	Nan Sabaris	13 606	14 517	28 123
6	2 x 11 Enam Lingkung	9 403	9 662	19 065
7	Enam Lingkung	9 912	10 061	19 973
8	2 x 11 Kayu Tanam	13 280	13 515	26 795
9	VII Koto	16 828	18 303	35 131
10	Patamuan	8 193	8 370	16 563
11	Padang Sago	3 993	4 380	8 373
12	V Koto Kampung Dalam	11 752	11 719	23 471
13	V Koto Timur	7 241	7 589	14 830
14	Sungai Limau	14 173	14 630	28 803
15	Batang Gasan	5 345	5 566	10 911
16	Sungai Geringging	13 510	14 535	28 045
17	IV Koto Aur Malintang	9 986	10 405	20 391
Padang Pariaman		202 400	208 603	411 003

Sumber: Padang Pariaman Dalam Angka 2018

Bila dilihat komposisi penduduk menurut umur, ternyata Kabupaten Padang Pariaman masih tergolong struktur umur muda. Ini

ditunjukkan dari persentase penduduk umur muda (di bawah 15 tahun) sebesar 34,58 persen dan penduduk umur 65 tahun ke atas sebesar 6,48 persen. Hal ini memberikan implikasi bahwa kelompok umur muda perlu mendapatkan perhatian dan pengembangan sehingga mampu menghasilkan tenaga-tenaga terampil dan mandiri untuk mengisi pembangunan di masa yang akan datang.

Besarnya penduduk usia muda ini mengakibatkan beban tanggungan penduduk usia produktif juga semakin besar. Secara kasar angka ini dapat digunakan sebagai indikator pengukur kemajuan ekonomi dari suatu daerah. Rasio ini menyatakan perbandingan penduduk berusia di bawah 15 tahun dan diatas 65 tahun yang dianggap tidak produktif secara ekonomi dengan jumlah penduduk berusia 15 sampai 64 tahun yang dianggap produktif secara ekonomi. Makin tinggi rasio beban tanggungan berarti semakin kecil jumlah penduduk produktif dan semakin banyak sumber daya yang harus dibagikan kepada kelompok tidak produktif.

Beban tanggungan anak di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2017 sebesar 51,08 dan beban tanggungan usia lanjut sebesar 12,52 persen. Hal ini berarti bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 51 orang anak dan 13 orang usia lanjut. Dengan kata lain bahwa beban tanggungan di Kabupaten Padang Pariaman masih cukup besar yaitu mencapai 63,61(63 orang) per 100 orang usia produktif.

**Tabel 3.3. Jumlah Penduduk Menurut
Golongan Umur dan Jenis Kelamin di Padang Pariaman Tahun 2017**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	20 566	19 800	40 366
5–9	22 250	21 044	43 294
10–14	23 053	21 611	44 664
15–19	19 567	18 384	37 951
20–24	13 712	13 069	26 781
25–29	12 663	12 506	25 169
30–34	12 368	12 744	25 112
35–39	12 280	13 311	25 591
40–44	12 724	12 889	25 613
45–49	11 045	12 158	23 203
50–54	10 216	11 636	21 852
55–59	9 416	11 155	20 571
60–64	9 232	10 141	19 373
65+	13 308	18 155	31 463
Jumlah/Total	202 400	208 603	411 003

Sumber: Padang Pariaman Dalam Angka 2018

3.2. Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia antara lain sangat tergantung kepada kualitas pendidikan. Dengan demikian program pendidikan mempunyai andil besar terhadap kemajuan bangsa, ekonomi maupun sosial.

Pada tahun 2017, persentase penduduk usia 5 tahun ke atas menurut partisipasi sekolah, menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk Kabupaten Padang Pariaman tidak bersekolah lagi, yaitu 63,32 persen (63,81 persen untuk penduduk laki-laki dan 62,87 persen untuk penduduk perempuan). Adapun penduduk yang masih sekolah sekitar 30,51 persen (31 persen penduduk laki-laki dan 30,02 persen untuk penduduk perempuan), sedangkan penduduk yang tidak sekolah/belum pernah sekolah masih ada sekitar 6,17 persen (5,19 persen untuk laki-laki dan 7,11 persen untuk penduduk perempuan).

Tabel 3.4. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Keatas Menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin di Padang Pariaman Tahun 2017

STATUS PENDIDIKAN	PERSENTASE		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
TIDAK/BELUM PERNAH SEKOLAH	5,19	7,11	6,17
MASIH SEKOLAH			
- SD	17,65	15,01	16,31
- SMP	5,71	7,02	6,38
- SMA	7,64	7,99	7,82
TIDAK BERSEKOLAH LAGI	63,81	62,87	63,32
JUMLAH	100,00	100,00	100,00

Sumber: Statkesra Padang Pariaman 2017

Rendahnya tingkat pendidikan dapat dirasakan sebagai penghambat

dalam pembangunan. Dengan demikian, tingkat pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Keadaan seperti ini sesuai dengan hakekat pendidikan itu sendiri, yakni merupakan usaha sadar untuk pengembangan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup.

Tabel 3.5. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Padang Pariaman Tahun 2017

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	Tidak/Belum Tamat Sekolah Dasar	13.29	16.24	29.54
2.	Sekolah Dasar	9.87	9.55	19.42
3.	Sekolah Menengah Pertama	11.49	11.81	23.29
4.	Sekolah Menengah Atas	11.20	10.80	22.01
5.	Diploma / Akademi	0.27	1.08	1.35
6	Universitas (DIV/S-1/S-2/S-3)	2.09	2.30	4.39
Jumlah/ Total		48.21	51.79	100.00

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka 2018

Penduduk usia 15 tahun ke atas yang pernah tamat sekolah, baik hanya tamat SD, SMP, SMA, maupun hingga tamat perguruan tinggi sebesar 70,46 persen, selebihnya sekitar 29,54 persen adalah mereka yang belum tamat sekolah dasar. Diantara yang telah menamatkan sekolah tersebut, hanya sekitar 4,39 persen yang sampai menyelesaikan pendidikan sampai jenjang pendidikan.

3.3. Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) digolongkan sebagai : (i) angkatan kerja, bila mereka bekerja atau mencari pekerjaan dan secara ekonomis berpotensi menghasilkan output atau pendapatan, dan (ii) bukan angkatan kerja bila mereka bersekolah, mengurus rumahtangga, dan lainnya. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berarti semakin besar keterlibatan penduduk usia 15 tahun ke atas, dalam pasar kerja.

Persentase penduduk usia kerja (15 tahun keatas) di Padang Pariaman tahun 2017 yang bekerja adalah sebesar 59,86 persen dari seluruh penduduk berusia 15 tahun keatas. Jika dilihat presentase yang bekerja berdasarkan jenis kelamin, sebesar 61,56 persen merupakan laki-laki dan 38,44 persen perempuan.

Tabel 3.6. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Padang Pariaman Tahun 2017

Jenis Kelamin	Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran	
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki/ <i>Male</i>	36,85	1,71	9,72
Perempuan / <i>Female</i>	23,01	2,55	26,16
Jumlah	59,86	4,26	35,88

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka 2018

Dari keseluruhan penduduk usia 15 tahun keatas, angkatan Kerja Padang Pariaman tahun 2017 yang bekerja adalah sebesar 59,86 persen dan yang tidak

masuk angkatan kerja sebesar 35,88 persen. Angkatan kerja yang bekerja laki-laki lebih tinggi dari perempuan, hal ini berarti bahwa penduduk laki-laki lebih banyak terlibat dalam pasar kerja. Sementara angkatan kerja yang pengangguran sekitar 4,26 persen penduduk berusia 15 tahun keatas.

Hal ini berarti bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki sebesar 78,87 persen dan TPAK perempuan 49,42 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) penduduk laki-laki sebanyak 4,44 persen dan TPT penduduk perempuan sebesar 9,99 persen.

Tabel 3.7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017

Pendidikan Yang Ditamatkan	TPAK		TPT	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tidak tamat SD	83.81	52.82	4.04	7.05
SD	80.06	50.03	3.88	13.24
SMP	65.98	32.91	0.98	6.10
SMA	85.31	48.03	8.81	16.27
Diploma	85.04	87.48	0	0
Sarjana	96.94	86.37	0	7.76
Jumlah	78.87	49.42	4.44	9.99

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka 2018

Jika dilihat tabel 3.7, terlihat bahwa pengangguran didominasi oleh lulusan SMA baik laki-laki maupun perempuan. Begitupun untuk Sarjana, 7,76 persen perempuan angkatan kerja menganggur. Hal ini menunjukkan bahwa tidak cukup pendidikan saja untuk bekerja, lebih dari itu keterampilan dan kemauan yang kuat akan membuat seseorang lebih diterima dalam pekerjaan, baik itu usaha sendiri maupun menjadi karyawan.

Lapangan pekerjaan utama yang terdiri dari sembilan sektor dibagi dalam lima kelompok lapangan usaha utama, yaitu Lapangan Usaha Pertanian, Perkebunan, Perburuan, dan Perikanan, Lapangan Usaha Industri, Lapangan Usaha Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi, Lapangan Usaha Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan, dan Lapangan Usaha Lainnya mencakup yang tidak termasuk kedalam 4 Lapangan Usaha sebelumnya.

Tabel 3.8. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama dan Jenis Kelamin di Padang Pariaman Tahun 2017

No	Lapangan Usaha	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	22,52	11,37	33,89
2.	Industri	5,92	8,72	14,64
3.	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	12,36	11,70	24,06
4.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	7,69	6,14	13,83
5.	Lainnya	13,06	0,51	13,57
Jumlah		61,56	38,44	100,00

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka 2018

Struktur lapangan pekerjaan di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan bahwa Lapangan Usaha Pertanian dan Perdagangan merupakan lapangan pekerjaan yang menonjol, jika dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya. Dari hasil Sakernas 2017 dalam Padang Pariaman Dalam Angka 2018, sekitar 33,89 persen penduduk Padang Pariaman bekerja di lapangan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan, 24,06 persen pada lapangan usaha Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi, 14,64 persen di lapangan usaha industri dan sisanya jasa dan lainnya (27,40 persen). Tingginya persentase pekerja pada sektor pertanian di Kabupaten Padang Pariaman, antara lain disebabkan daerah ini mempunyai potensi yang cukup besar dalam bidang pertanian dan didukung pula oleh daerahnya yang cukup luas.

Tabel 3.9. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2017

	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tidak / Belum Tamat SD	15,22	12,57	27,79
2	Sekolah Dasar	12,58	6,20	18,78
3	SMP / MTs dan Sederajat	12,54	5,87	18,41
4	SMA / MA dan Sederajat	16,49	5,65	24,83
5	Diploma / Akademi	0,93	3,95	2,14
6	Universitas (DIV/S-1/S-2/S-3)	3,86	4,19	8,05
	Jumlah	61,56	38,44	100,00

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka 2018

Pendidikan penduduk yang bekerja masih cukup rendah. Pekerja dengan pendidikan yang ditamatkan lebih dari SMP hanya mencapai 53,43 persen. Sementara pekerja dengan pendidikan SD kebawah sebanyak 46,57

persen. Penduduk 15 tahun keatas yang tidak tamat SD mendominasi pekerja di Padang Pariaman yaitu 27,79 persen terutama di lapangan usaha pertanian. Kelompok ini sebagian besar merupakan golongan umur produktif yang mendekati usia lanjut.

3.4. Perekonomian

Untuk menilai atau mengetahui berhasil atau tidaknya pembangunan yang dilakukan, perlu adanya suatu indikator guna mengukur tingkat keberhasilan pembangunan daerah tersebut. Pendapatan regional merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan untuk mengetahui berhasil tidaknya pembangunan yang dilaksanakan.

Salah satu indikator makro dibutuhkan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Padang Pariaman Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mulai pada tahun 2017 disajikan dengan tahun dasar yang baru yaitu 2010, dan disajikan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dengan maksud agar dapat ditelaah perkembangan PDRB sebelum dan sesudah pengaruh perubahan harga.

Tabel 3.10. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Padang Pariaman Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2016 – 2017 (Juta Rupiah)

Kategori	PDRB Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
		2016 *)	2017 **)	2016 *)	2017 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.488.872,1	3.731.537,4	2.480.498,2	2.580.351,2
B	Pertambangan dan Penggalian	1.028.331,7	1.097.524,8	668.102,7	696.430,3
C	Industri Pengolahan	1.883.643,2	1.949.723,6	1.551.134,4	1.593.125,9
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.005,4	6.001,9	3.647,6	3.796,2
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.253,1	7.843,4	6.027,2	6.270,9
F	Konstruksi	1.291.854,8	1.415.070,8	926.580,9	999.829,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.475.558,2	1.596.549,6	1.156.316,4	1.213.926,6
H	Transportasi dan Pergudangan	5.597.003,0	6.372.815,9	2.721.975,7	2.935.746,5
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	147.694,6	159.050,9	93.852,2	99.911,9
J	Informasi dan Komunikasi	444.219,4	480.487,6	459.815,5	491.790,8
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	244.400,5	261.229,3	185.581,0	190.868,8
L	Real Estate	156.247,6	164.989,1	118.295,9	123.015,9
M,N	Jasa Perusahaan	12.334,6	12.987,2	9.963,2	10.252,8
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	737.175,7	778.378,6	584.431,7	610.200,0
P	Jasa Pendidikan	725.032,8	847.757,9	518.895,2	567.775,2
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	87.264,9	95.178,9	68.923,2	74.864,4
R,S,T,U	Jasa lainnya	200.981,7	228.280,8	142.998,9	152.430,2
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		17.532.873,3	19.205.407,5	11.697.040,0	12.350.587,0

Sumber: PDRB Padang Pariaman Menurut Lapangan Usaha 2017

Catatan : *) angka sementara

**) angka sangat sementara

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2017 mencapai 5,59 persen. Kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

sebesar 19,43 persen, menurun dibandingkan dengan tahun 2016 dengan kontribusi 19,90 persen. Penyumbang terbesar pertama bagi perekonomian Kabupaten Padang Pariaman adalah kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 33,18 persen pada 2017 dan 31,92 persen pada 2016.

Peranan yang mempunyai peranan yang sangat kecil dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Padang Pariaman adalah dari kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; serta kategori pengadaan listrik dan gas yang masing-masing perannya sebesar 0,04 dan 0,03 persen.

Pertumbuhan PDRB (pertumbuhan ekonomi) yang cukup tinggi belum tentu mencerminkan peningkatan kesejahteraan rakyat, karena hal ini sangat tergantung pada perkembangan jumlah penduduk dan pengelolaan faktor-faktor ekonomi di Padang Pariaman. Walaupun pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang cukup signifikan tetapi jika pertumbuhan penduduk tidak dapat ditekan maka pertumbuhan ekonomi tidak dapat meningkatkan PDRB perkapita masyarakat. Begitupun halnya dengan penguasa faktor-faktor ekonomi yang merupakan golongan atas, sehingga PDRB yang terbentuk bukanlah milik sebagian besar penduduk menengah kebawah. Bila terjadi pertumbuhan PDRB (pertumbuhan ekonomi) yang negatif akan menunjukkan terjadinya penurunan perekonomian secara keseluruhan.

PDRB perkapita Kabupaten Padang Pariaman Atas Dasar Harga Berlaku mengalami kenaikan dibanding tahun 2016, demikian pula dengan PDRB perkapita Kabupaten Padang Pariaman Atas Dasar Harga Konstan 2010 mengalami kenaikan. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2016 sebesar 42,91 juta rupiah menjadi 46,73 juta rupiah pada tahun 2017, sedang PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 pada tahun 2016 sebesar 28,63 juta rupiah naik menjadi Rp 30,05 juta rupiah pada tahun 2017.

PDRB perkapita tidak mutlak dapat dikatakan sebagai pendapatan dari masyarakat pada daerah tersebut, karena Nilai Tambah Bruto (NTB) dari suatu kegiatan ekonomi pada suatu daerah belum tentu dinikmati seluruhnya oleh masyarakat daerah tersebut sehingga PDRB perkapita tidak dapat digambarkan langsung sebagai pendapatan perkapita.

4.1. Indeks Pendidikan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia diarahkan pada upaya pembangunan di bidang pendidikan. Semenjak awal tahun 90-an pemerintah Republik Indonesia telah mencanangkan Program Wajib Belajar 9 Tahun yang diharapkan meningkatkan partisipasi anak, khususnya anak usia sekolah, dalam pendidikan dasar. Hal ini sesuai dengan salah satu amanat yang diemban pemerintah sesuai dengan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berusaha semaksimal mungkin untuk mengemban amanat ini yang diaktualisasikan melalui Renstra Kabupaten Padang Pariaman dan kebijakan pembiayaan melalui APBN dan APBD.

Ukuran yang sangat mendasar dari indikator pendidikan, secara makro adalah kemampuan baca tulis (melek huruf) penduduk berusia 15 tahun ke atas, yaitu kemampuan untuk membaca dan menulis huruf latin dan lainnya. Pada tahun 2017 angka melek huruf di Kabupaten Padang Pariaman adalah 95,89 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan angka melek huruf Provinsi Sumatera Barat yang tercatat sebesar 97,96 persen. Tabel 4.1 menyajikan penduduk 15 tahun keatas menurut kemampuan membaca dan menulisnya.

Tabel 4.1
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Kemampuan Membaca dan Menulis di Padang Pariaman Tahun 2017

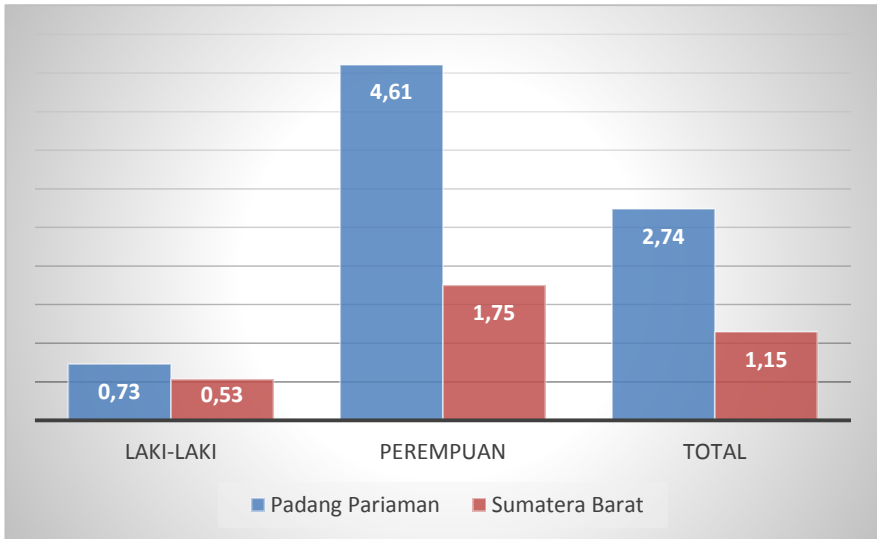
Karakteristik	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Lainnya	Buta Huruf
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jenis Kelamin				
Laki-laki	98.61	15.98	0,59	0.73
Perempuan	93.37	18.91	0.34	4.61
Padang Pariaman	95.89	17.50	0.46	2.74
Sumatera Barat	97,96	29,02	0,24	1,15

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2017

Indikator pendidikan lainnya yang merupakan kebalikan dari melek huruf adalah buta huruf. Tingkat buta huruf Kabupaten Padang Pariaman lebih tinggi di atas rata-rata Sumatera Barat .

Jika dirinci menurut jenis kelamin, maka tingkat buta huruf penduduk perempuan di Kabupaten Padang Pariaman jauh lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki yaitu masing-masing 4,61 persen dan 0,73 persen.

Grafik 4.1
Perbandingan Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Buta Huruf
Menurut Jenis Kelamin di Padang Pariaman dan Sumatera Barat Tahun 2017

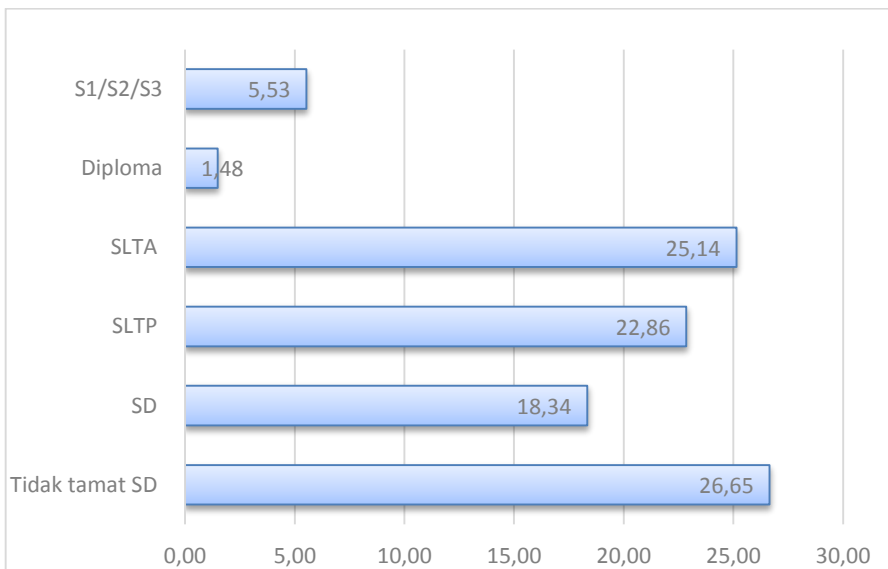


Sumber : Statistik Daerah Padang Pariaman dan Sumatera Barat 2017

Tingkat buta huruf menurut kelompok umur di Kabupaten Padang Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Grafik 4.1. Tingginya tingkat buta huruf di suatu daerah biasanya disebabkan oleh tingginya tingkat buta huruf pada kelompok umur tua, karena penduduk jaman dahulu masih banyak yang belum memiliki pendidikan/tidak bersekolah. Pada saat ini rata-rata penduduk sudah sadar akan pentingnya pendidikan, namun yang perlu mendapat perhatian serius adalah jika tingkat buta huruf terjadi pada kelompok umur muda dengan angka yang cukup tinggi.

Ukuran lain dari tingkat pendidikan yang menjadi indikator dari IPM adalah rata-rata lama sekolah. Secara umum indikator ini menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk dewasa. Pada tahun 2017, rata-rata lama sekolah penduduk dewasa (15 tahun ke atas) di Kabupaten Padang Pariaman sebesar 7,21 tahun, yang berarti secara umum penduduk di Padang Pariaman sudah menyelesaikan tingkat pendidikan sampai jenjang Sekolah Dasar. Kondisi ini sudah lebih rendah dari angka rata-rata lama sekolah Sumatera Barat secara umum yang tercatat sebesar 8,72 tahun.

Grafik 4.2. Presentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Terakhir yang ditamatkan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017

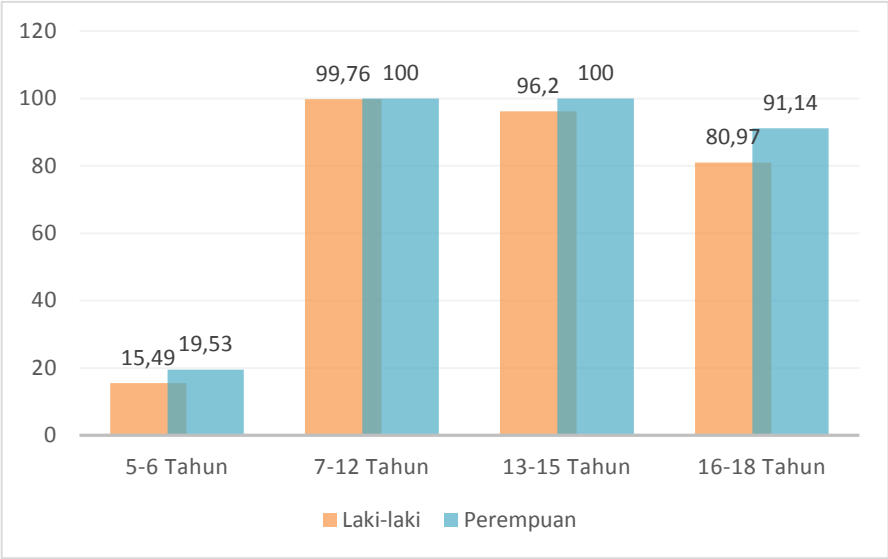


Sumber: Padang Pariaman Dalam Angka 2018

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar penduduk golongan umur 15 tahun keatas merupakan penduduk yang tidak menamatkan sekolah dasar sebanyak 26,65 persen. Namun, yang lulus SLTA juga

mencapai angka 25,14 persen. Penduduk tidak tamat SD didominasi oleh penduduk usia tua. Penduduk yang sampai menyelesaikan pendidikan hingga SMA termasuk golongan umur dewasa dan muda.

Grafik 4.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal Penduduk Berumur 5-18 Tahun menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2017



Sumber: Padang Pariaman Dalam Angka

Sementara Angka Partisipasi Sekolah (APS) di sekolah formal baik negeri maupun swasta penduduk usia 5-18 tahun cukup baik. Terlihat dari grafik 4.2 bahwa pada rentang usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang perempuan sudah bersekolah semua. Namun, partisipasi anak usia 5-6 tahun disekolah formal belum banyak. Hal ini disebabkan naiknya standar umur minimal masuk sekolah dasar yaitu 7 tahun dan dibuka sekolah usia dini non formal di beberapa daerah di Padang Pariaman.

Selanjutnya berkaitan dengan penentuan IPM, pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa salah satu komponen pembentuk IPM adalah indeks Pendidikan. Indeks Pendidikan itu terdiri dari indeks harapan lama sekolah dan indeks rata-rata lama sekolah. Pada tahun 2017, dari hasil penghitungan harapan lama sekolah di Padang Pariaman tercatat sebesar 13,56 tahun dan rata-rata lama sekolah adalah sebesar 7,21 tahun. Angka ini masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat, dimana harapan lama sekolah serta rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Barat masing-masing sebesar 13,94 tahun serta 8,72 tahun.

4.2 Indeks Kesehatan

Kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan dapat dipandang dari aspek fisik dan non fisik yang tentunya keduanya saling berkaitan. Kualitas fisik penduduk dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Salah satu indikator utama dalam mengukur derajat kesehatan penduduk secara makro adalah angka harapan hidup waktu lahir. Angka harapan hidup ini memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara makro. Kebijakan peningkatan kesehatan sejak Pelita I antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, diharapkan dapat meningkatkan angka harapan hidup penduduk. Semakin tinggi angka harapan hidup menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat secara makro semakin tinggi.

Angka harapan hidup di Kabupaten Padang Pariaman dari tahun ke tahun diharapkan semakin meningkat. Berdasarkan hasil Susenas pada tahun 2017 diperkirakan angka harapan hidup penduduk Kabupaten Padang Pariaman tercatat sekitar 67,96 tahun, meningkat dibanding tahun 2016 yang hanya

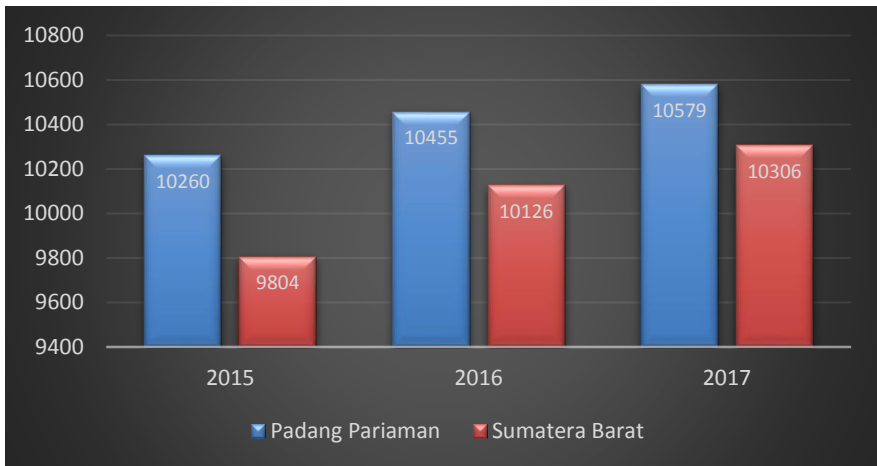
sebesar 67,80 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan di Kabupaten Padang Pariaman juga mengalami peningkatan. Namun, angka harapan hidup Padang Pariaman masih dibawah Provinsi Sumatera Barat yang pada 2016 dan 2017 mencapai 68,73 tahun dan 68,78 tahun.

4.3 Indeks Pengeluaran

Indeks Pengeluaran digunakan untuk mengukur standar hidup layak Indikator ini dipengaruhi pengetahuan yang dimiliki serta peluang yang ada untuk merealisasikan pengetahuan dalam berbagai bentuk barang/jasa sebagai pengeluaran. Sehingga dengan pendapatan yang ada manusia dapat menciptakan daya beli untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Dalam penghitungan indeks Pengeluaran digunakan pendekatan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi di daerah masing-masing. Penyesuaian ini diperlukan untuk menstandarkan tingkat harga yang berlaku di masing-masing daerah. Tingkat pengeluaran perkapita yang sama di suatu daerah belum tentu menunjukkan daya beli terhadap barang dan jasa yang sama karena tingkat harga di setiap daerah itu berbeda dan selera/pola konsumsi masyarakat berbeda, oleh sebab itu pengeluaran perkapita ini terlebih dahulu disesuaikan untuk dapat mengukur tingkat daya beli yang nyata.

Pada tahun 2017, pengeluaran perkapita penduduk Padang Pariaman diperkirakan sebesar 10.579.000 rupiah. Jika dibandingkan dengan Sumatera Barat secara umum, dapat dikatakan bahwa standar hidup penduduk Kabupaten Padang Pariaman sudah lebih tinggi, yang ditunjukkan pada grafik 4.5 berikut:

Grafik 4.4.
Perbandingan Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan antara Padang Pariaman
dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015- 2017 (Rp.000)



Sumber: Berita Resmi Statistik IPM Sumbar 2017

Jika dibandingkan dengan provinsi Sumatera Barat keseluruhan Pengeluaran perkapita penduduk Padang Pariaman lebih tinggi sejak tahun 2015. Pengeluaran perkapita Padang Pariaman tahun 2015 sebesar Rp10.260.000,- meningkat terus pada tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp10.455.000,- dan Rp10.579.000,-. Begitupun untuk provinsi Sumatera Barat, peningkatan pengeluaran perkapita mulai dari 2015 sebesar Rp9.804.000,-, 2016 sebesar Rp10.126.000,-, dan 2017 sebesar Rp10.306.000,-.

5.1. Status Pembangunan Manusia

Dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), UNDP membagi tingkatan status pembangunan manusia suatu negara atau wilayah ke dalam empat golongan yaitu :

1. Rendah
2. Sedang
3. Tinggi.
4. Sangat tinggi.

Jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria rendah hal ini berarti kinerja pembangunan manusia daerah tersebut masih memerlukan perhatian khusus untuk mengejar ketinggalannya. Begitu juga jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria sedang hal ini berarti pembangunan manusia masih perlu ditingkatkan. Jika daerah tersebut mempunyai status pembangunan manusia tinggi hal ini berarti kinerja pembangunan manusia daerah tersebut sudah baik/optimal maka perlu dipertahankan supaya kualitas manusia tersebut lebih produktif sehingga memiliki produktivitas yang tinggi.

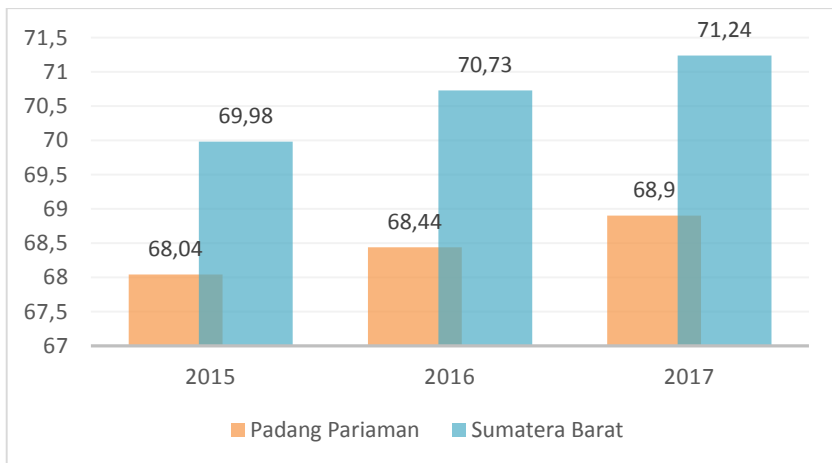
Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokkan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam dalam hal pembangunan manusia. Berikut ini disajikan uraian

tingkatan status dengan kriteria sebagai berikut :

Tingkatan Status	Kriteria
Rendah	$IPM < 60$
Sedang	$60 \leq IPM < 70$
Tinggi	$70 \leq IPM \leq 80$
Sangat tinggi	$IPM > 80$

Pada tahun 2017 IPM Padang Pariaman adalah sebesar 68,90 berada pada status sedang, meningkat dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 68,44. Diperlukan usaha yang lebih keras untuk meningkatkan status pembangunan manusia Padang Pariaman menjadi “tinggi”.

Grafik 5.1 Perbandingan IPM Kabupaten Padang Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2017



Sumber: Berita Resmi Statistik Sumatera Barat IPM 2017

Jika diperhatikan komponen-komponen pembentuk IPM di Padang Pariaman, dimensi daya beli sudah lebih baik dari Sumatera Barat secara umum, namun untuk pendidikan dan kesehatan masih belum. Hal ini perlu ditingkatkan lagi pada masa

mendatang dengan peningkatan pelayanan baik dibidang pendidikan maupun kesehatan. Komponen yang paling besar memberikan sumbangan bagi peningkatan IPM Kabupaten Padang Pariaman adalah pengeluaran perkapita penduduk yang disesuaikan.

Tabel 5.1 Status dan Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Padang Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

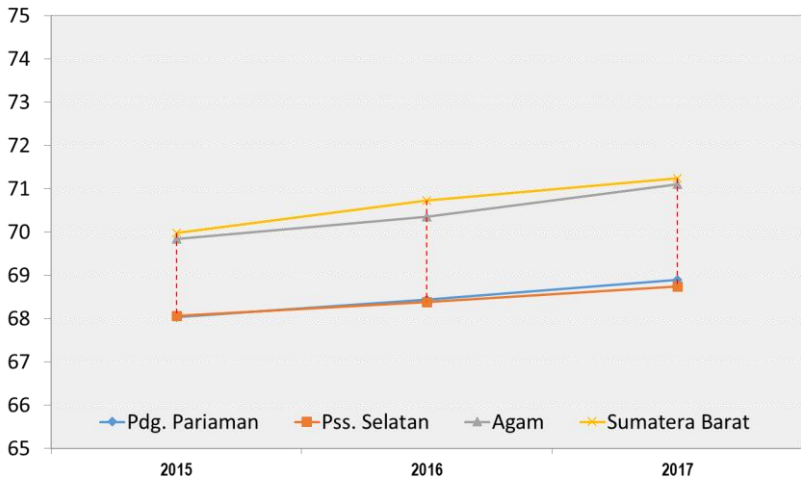
Komponen IPM	Padang Pariaman		Sumatera Barat	
	Nilai	Status	Nilai	Status
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Usia Harapan Hidup (Tahun)	67,96		68,78	
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,56		13,94	
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,21		8,72	
Pengeluaran per kapita (000 Rp)	10.579		9.804	
IPM	68,90	Sedang	71,24	Tinggi

Sumber: Berita Resmi Statistik Sumatera Barat IPM 2017

5.2. Tren Perbandingan IPM Kabupaten Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Agam dan Provinsi Sumatera Barat

Padang Pariaman memiliki kesamaan dengan dua kabupaten lain dalam hal kondisi geografis dan luas wilayah yaitu Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Agam. Adapun kondisi IPM ketiga kabupaten dan perbandingannya dengan provinsi Sumatera Barat tergambar dalam grafik 5.2 berikut ini.

Grafik 5.2 Perbandingan IPM Kabupaten Padang Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2017



Sumber: Berita Resmi Statistik Sumatera Barat IPM 2017

IPM Padang Pariaman memiliki kecenderungan terus meningkat walaupun masih berada dibawah IPM Sumatera Barat dan Kabupaten Agam. Begitupun Kabupaten Pesisir Selatan yang IPMnya terus meningkat perlahan. Hal ini menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Agam lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pesisir Selatan. Sementara Kabupaten Pesisir Selatan tren IPMnya sedikit dibawah Kabupaten Padang Pariaman.

Bab 6.

ANALISIS IPM TERHADAP KEMISKINAN, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

6.1. Pendahuluan

Bab 5 telah diperlihatkan hasil perhitungan IPM tahun 2017 dan dibandingkan hasil capaian IPM dengan capaian Sumatra Barat. Pada bab ini akan ditelusuri lebih detail, bagaimana kecenderungan teknokratik masalah komponen IPM yang paling utama, terkait cepat lambat pertumbuhan serta perkembangannya.

Untuk itu dilakukan dua cara. Cara pertama adalah melihat tren pertumbuhan IPM, dengan tahun dasar 2010 dan menggunakan metode baru. Kedua adalah membandingkan masing-masing sub komponen capaian IPM, dengan kabupaten pembanding.

Setelah mempelajari bagaimana capaian dari masing-masing pembanding sub komponen, analisis berikutnya menemukan sub komponen yang paling bermasalah dari masing-masing pembentuk Indeks Pembangunan Manusia.

Tujuan mengetahui ini guna mendeteksi faktor utama apa yang menyebabkan terlambatnya pencapaian IPM, dengan demikian akan diketahui prioritas kebijakan yang dapat diarahkan dalam pembangunan manusia Kabupaten Padang Pariaman selanjutnya.

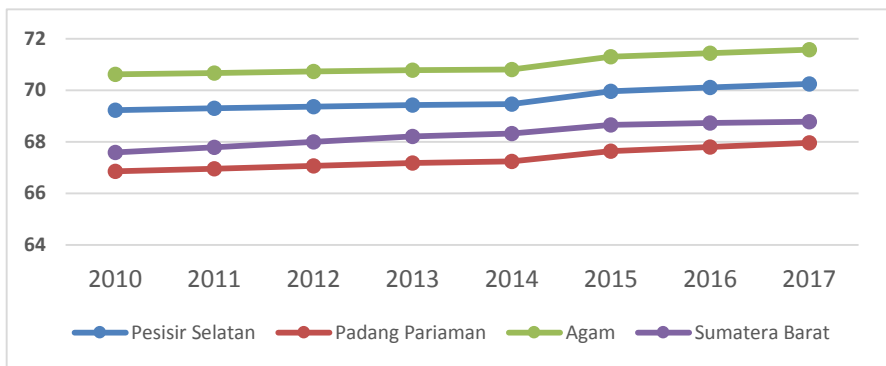
6.2 Kesehatan

Analisis berikutnya memperlihatkan salah satu indikator yang dapat merefleksikan kemajuan dari aspek kesehatan dapat dinilai dari capaian angka harapan hidup.

Dalam melihat capaian komponen kesehatan, dapat dipahami bahwa

meskipun laju perbaikan angka harapan hidup relatif tinggi, bahkan mendekati capaian Sumatra Barat, dalam konteks ini capaian angka harapan hidup di Agam menunjukkan tendensi yang lebih cepat, dibandingkan dengan kabupaten Padang Pariaman, atau Pesisir Selatan. Sengan demikian dapat dilihat bahwa aspek kesehatan dapat dijadikan salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalam perbaikan IPM.

Gambar 6.1. Perkembangan Angka Harapan Hidup Padang Pariaman 2010-2017



Sumber: IPM BPS Kab. Padang Pariaman

Kita mengetahui bahwa angka harapan hidup merupakan refleksi dari capaian aspek kesehatan, pada analisis akhir akan terlihat bahwa komponen kesehatan mana yang menjadi akar masalah.

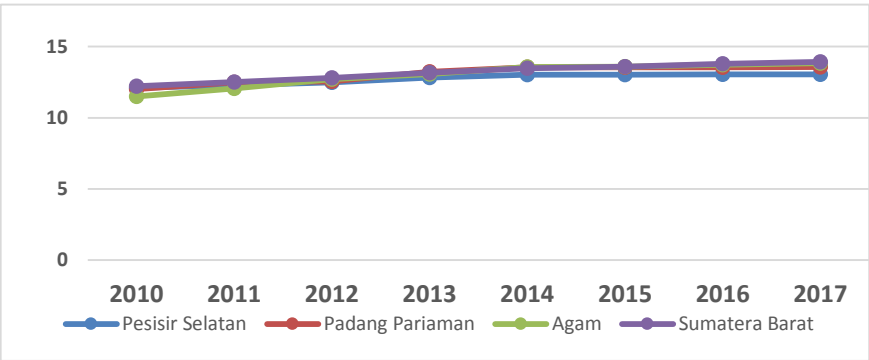
6.3. Harapan Lama Sekolah

Analisis pada bagian ini menemukan bahwa selama 7 tahun terakhir keinginan masyarakat untuk menempuh pendidikan lebih tinggi meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada tahun 2010, harapan sekolah yang menjadi persepsi masyarakat adalah selama 12 tahun, setara dengan tamat SMA, sementara pada tahun 2017, hampir semua masyarakat berpeluang mendapatkan pendidikan setingkat pendidikan tinggi, yakni selama sekitar 15 tahun. Tidak terlihat

perbedaan mencolok antara harapan lama sekolah masyarakat Padang Pariaman dengan masyarakat provinsi Sumatra Barat.

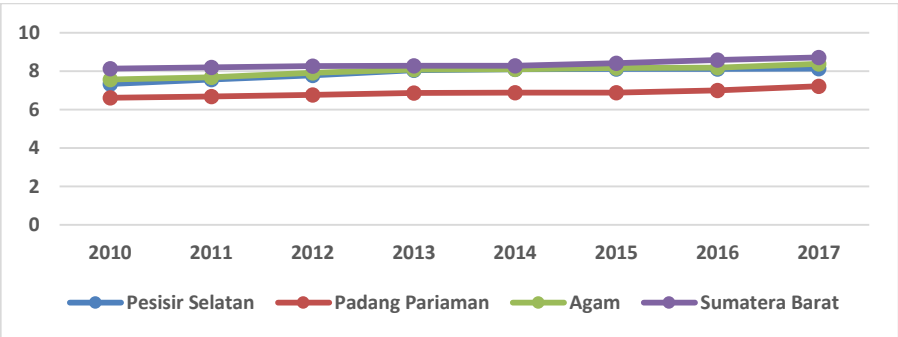
Meningkatnya harapan hidup salah satunya disebabkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui program baik dari pusat maupun daerah dengan menjangkau masyarakat miskin untuk bisa meningkatkan pendidikan, apalagi didukung dengan ketersediaan pendidikan tinggi swasta yang mulai ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Gambar 6.2 Harapan Lama Sekolah Padang Pariaman, 2010-2017



Sumber: IPM BPS kab. Padang Pariaman

Gambar 6.3 Rata-rata Lama Sekolah Padang Pariaman, 2010-2017



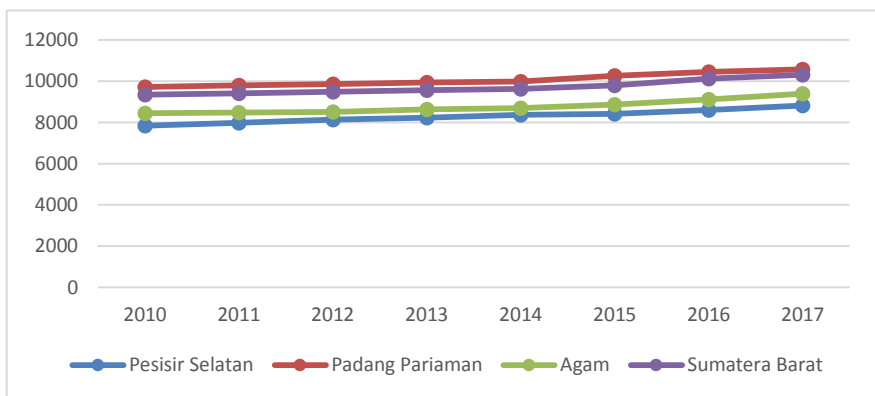
Sumber: IPM BPS Kab. Padang Pariaman

Analisis data yang ada menunjukkan bahwa meskipun capaian harapan pendidikan relatif sama, capaian rata-rata lama pendidikan masyarakat baru mencapai sedikit di atas 7 tahun. Pertambahan selama 7 tahun hanya selama sekitar 0,6 bulan, dan setiap tahun hanya bertambah sekitar 0,1. Ini menunjukkan kecenderungan bahwa angka putus sekolah cukup tinggi di daerah ini.

6.4. Daya Beli (*Purchasing Power*)

Komponen daya beli masyarakat merupakan refleksi dari program ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Meskipun untuk komponen pendidikan dan kesehatan selama 7 tahun terakhir Kabupaten Padang Pariaman masih dibawah, untuk pertumbuhan daya beli Padang Pariaman lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pembanding. Perkembangan ini, menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan sudah membuka kesempatan berusaha, hal ini terlihat dengan semakin terlihat aktivitas ekonomi di sepanjang jalan raya Kabupaten Padang Pariaman.

Gambar 6.4 Daya Beli Padang Pariaman, 2010-2017



Sumber: bps.go.id berbagai tahun

Selanjutnya akan dianalisis terkait kontribusi masing-masing komponen

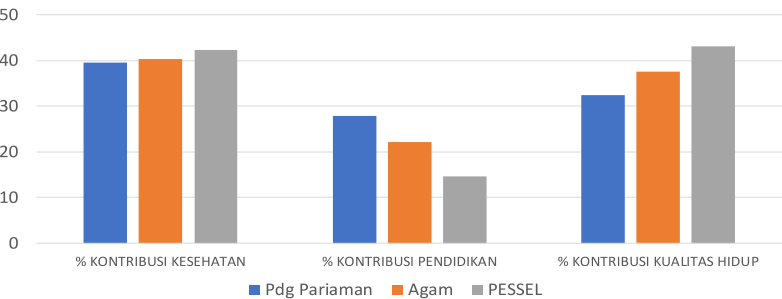
yang ada, khususnya dalam konteks deprivasi dan masalah kemiskinan. Dalam analisis berikut ini akan ditemukan bagaimana masing-masing komponen menjadi faktor utama dari lambannya pertumbuhan capaian Indeks Pembangunan Manusia.

6.4. Kontribusi Deprivasi

Pada gambar 6.4. berikut dilakukan perbandingan untuk menilai mana yang paling berperan dalam proses pembentukan indeks pembangunan manusia diantara aspek kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup. Secara singkat dapat dilihat perbandingan antara Padang Pariaman kabupaten lainnya sebagai pembanding. Tiga komponen yang dibandingkan menunjukkan temuan bahwa, faktor kesehatan menjadi permasalahan utama yang ditemukan di Kabupaten Padang Pariaman. Sekitar 40% permasalahan komponen IPM berasal dari aspek kesehatan. Selanjutnya adalah komponen kualitas hidup. Sementara untuk masalah pendidikan memberikan kontribusi sekitar 28%.

Gambar 6.5.

KONTRIBUSI 3 ASPEK TERHADAP KEMISKINAN:
KESEHATAN JUGA MENJADI PERSOALAN DI
PADANG PARIAMAN



Sumber: bps.go.id berbagai tahun

Pengolahan data memperlihatkan, bahwa dalam komponen kesehatan kontribusi komponen sanitasi dan air minum menempati posisi terbesar dalam memperlambat pencapaian indeks pembangunan manusia. Selain itu, fasilitas infrastruktur untuk kesehatan dan persoalan gizi memang masih harus menjadi perhatian. Artinya perbaikan gizi balita menjadi salah satu upaya yang strategis untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan indikator kesehatan. Dalam hal pelayanan melahirkan sudah menunjukkan peningkatan, artinya sistem pelayanan kesehatan yang dibangun sudah menunjukkan proses yang semakin baik.

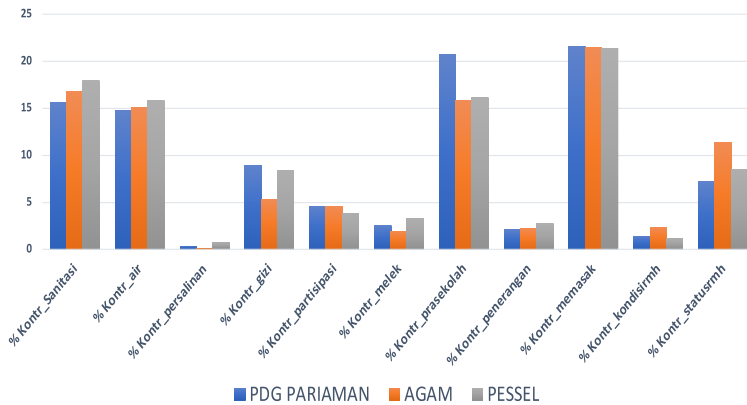
Pada komponen pendidikan, ada dua persoalan serius yang masih dihadapi di Padang Pariaman. Yaitu masih rendahnya akses keluarga miskin dalam memperoleh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan persoalan akses melanjutkan pendidikan. Akan tetapi, persoalan akses pendidikan ini sudah ditekan serendah mungkin.

Sementara persoalan yang berkaitan dengan kontribusi kualitas hidup memperlihatkan bahwa, penggunaan bahan bakar kayu serta status kepemilikan rumah merupakan hal yang menonjol. Hal ini akan berdampak kepada kesehatan keluarga, berupa asap dalam rumah tangga dan masalah yang berkaitan dengan status rumah. Sertifikasi rumah adalah salah satu cara yang mungkin mempermudah keluarga untuk mengoptimalkan sumberdaya aset rumah tangga.

Dengan demikian sudah jelas prioritas yang harus dilakukan dalam program selanjutnya adalah dengan memberikan perhatian pada permasalahan komponen yang sudah dibahas.

Gambar 6.6

KONTRIBUSI GIZI DAN PRASEKOLAH MENJADI KEBIJAKAN UTAMA KARENA INI MENOJOL DI PADANG PARIAMAN



Bab 7.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan juga penjelasan-penjelasan yang telah dibuat pada bagian sebelumnya diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan atau kinerja (*performance*) suatu pemerintahan dalam bidang pembangunan manusia.
2. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang harus diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.
3. Pada tahun 2017 angka harapan hidup sebagai salah satu komponen IPM, di Kabupaten Padang Pariaman sebesar 67,96, kondisinya masih lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Sumatera Barat sebesar 68,78.
4. Rata-rata lama sekolah penduduk berumur 10 tahun ke atas di Kabupaten Padang Pariaman sebesar 7,21 tahun, berarti secara umum penduduk di Padang Pariaman sudah menyelesaikan Sekolah Dasar bahkan sudah sampai kelas satu SMP.
5. Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2017 sebesar 13,56 tahun, masih sedikit dibawah angka rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang sebesar 13,94 tahun.
6. Standar hidup penduduk Kabupaten Padang Pariaman masih lebih tinggi

dibanding kondisi di provinsi Sumatera Barat. Hal ini tercermin melalui tingkat daya beli penduduk Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp 10.579.000,- yang lebih tinggi dari penduduk Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 10.306.000,- secara umum.

7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Padang Pariaman tahun 2017, berada pada kategori sedang.
8. Masalah IPM, di Padang Pariaman terutama disebabkan karena rendahnya komponen kesehatan, diikuti oleh kontribusi kualitas hidup, kemudian oleh persoalan pendidikan. Fasilitas fisik perumahan dan gizi pemberi kontributor rendahnya capaian kesehatan, rendahnya akses anak-anak pada pendidikan PAUD, dan penggunaan kayu bakar untuk memasak, dan legalitas kepemilikan rumah yang tidak bersertifikasi merupakan akar masalah utama dalam pembentukan IPM.

7.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang didapat beberapa hal yang dapat dijadikan rekomendasi terhadap Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam pengambilan keputusan dalam melaksanakan pembangunan manusia khususnya adalah :

1. Perhatian khusus perlu diberikan terhadap sektor pendidikan, guna mencapai harapan lama sekolah dan juga pencapaian rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi lagi. Jika tingkat pendidikan semakin baik maka manusia sebagai modal dasar pembangunan Padang Pariaman dapat membangun perekonomian penduduk Kabupaten Padang Pariaman menjadi lebih baik. Tentunya hal ini tidak

hanya didukung oleh kurikulum sekolah, tetapi juga terkait pembelajaran keterampilan dan kekuatan mental.

2. Perhatian pada sektor kesehatan harus terus ditingkatkan, guna meningkatkan kualitas kesehatan penduduk Kabupaten Padang Pariaman. Selain fokus pada penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang lebih memadai hendaknya ada pembinaan khusus terkait pelayanan kesehatan yang lebih beradab dan lebih mengayomi. Sehingga masyarakat tidak takut untuk berobat ke fasilitas kesehatan pemerintah dan juga akan meningkatkan indeks keluarga sehat.
3. Perlu penyeimbangan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia, agar pembangunan ekonomi tetap kondusif seiring peningkatan kualitas manusia.
4. Upaya untuk prioritas peningkatan infrastruktur manusia, sanitasi air minum dan perbaikan gizi adalah prioritas pembangunan. Selain dari itu pembangunan prasekolah, legalisasi rumah dan pengembangan sistem memasak masyarakat akan memberikan dampak terhadap perbaikan IPM ke depan.

LAMPIRAN

**Tabel 4.1 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita di
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2017**

Kelompok pengeluaran	Sumatera Barat
[1]	[2]
< 200.000	0,02
200.000-299.999	0,45
300.000-499.999	11,03
500.000-749.999	29,37
750.000-999.999	21,78
1.000.000-1.499.999	21,29
1.500.000 +	16,10

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka 2018

**Tabel 4.2 Rata-Rata Pengeluaran / Kapita/ Bulan
di Kabupaten Padang Pariaman dan Provinsi
Sumatera Barat
Tahun 2017 (Rupiah)**

Daerah	Pengeluaran		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
[1]	[2]	[3]	[4]
Padang Pariaman	471.161	433.490	904.651
Sumatera Barat	584.050	469.760	1.053.810

Sumber : Padang Pariaman dan Sumatera Barat Dalam Angka 2018

**Tabel 4.3 Persentase Rata-Rata Pengeluaran / Kapita/ Bulan di
Kabupaten Padang Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat Tahun
2017**

Daerah	Pengeluaran		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
[1]	[2]	[3]	[4]
Padang Pariaman	52,08	47,92	100,00
Sumatera Barat	55,42	44,58	100,00

Sumber : Padang Pariaman dan Sumatera Barat Dalam Angka 2018

**Tabel 4.4 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Padang Pariaman dan Sumatera Barat
Tahun 2014-2017 (Juta Rp)**

Tahun	Padang Pariaman	Sumatera Barat
[1]	[2]	[3]
2014	14.152.526,98	164.944.256,80
2015	15.845.888,21	179.951.980,32
2016	17.532.873,33	196.442.935,07
2017	19.532.873,33	214.585.229,26

Sumber : Padang Pariaman dan Sumatera Barat Dalam Angka 2018

**Tabel 4.5 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Padang Pariaman dan Sumatera Barat
Tahun 2014-2017 (milyar Rp)**

Tahun	Padang Pariaman	Sumatera Barat
[1]	[2]	[3]
2014	14.152.525,98	133.340.836,44
2015	15.845.888,21	140.719.474,19
2016	17.532.873,33	148.134.243,89
2017	19.205.407,50	155.963.985,42

Sumber : Padang Pariaman dan Sumatera Barat Dalam Angka 2018

Tabel 4.6 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2017(%)

Tahun	Padang Pariaman	Sumatera Barat
[1]	[2]	[3]
2014	6,05	5,88
2015	6,14	5,53
2016	5,52	5,27
2017	5,59	5,29

Sumber : Padang Pariaman dan Sumatera Barat Dalam Angka 2018



DATA

MENCERDASKAN BANGSA